



Pendidikan Inklusif: Suatu Strategi Menuju Pendidikan untuk Semua

Zulkifli Sidiq¹, Abdul Latif², Nurfaidah³

¹Universitas Pendidikan Indonesia, ²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ³SDN 131/IV Kota Jambi

Received on: 10-11-2022

Accepted on: 14-11-2022

Abstrak

Pendidikan inklusif akhir-akhir ini mulai digencarkan di Indonesia. Pada praktiknya, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya, ekonomi, agama, kemampuan berpikir, serta kondisi fisik yang berbeda. Metode yang digunakan pada artikel ini ialah *library research* dengan mengumpulkan sumber-sumber dari studi pustaka mengenai pendidikan inklusif. Artikel ini menguraikan mengenai pengertian pendidikan inklusif, definisi *special needs*, alasan perlunya pendidikan inklusif, serta perbedaan pendidikan integrasi dan pendidikan inklusif.

Kata-kata kunci: inklusif, strategi, pendidikan untuk semua

Abstract

Inclusive education has recently begun to be intensified in Indonesia. In practice, inclusive education is education that is given to students who come from different social and cultural, economic, religious backgrounds, thinking abilities, and physical conditions. The method used in this article is library research by collecting sources from literature studies on inclusive education. This article describes the meaning of inclusive education, the definition of special needs, the reasons for the need for inclusive education, and the differences between integrated education and inclusive education.

Keywords: inclusive, strategy, education for all

A. Pendahuluan

Selama beberapa tahun kita telah mengamati bahwa anak-anak dan remaja berhenti sekolah pada jumlah yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan merupakan sebuah alasan untuk fenomena ini. Akan tetapi bukan hanya itu alasan satu-satunya. Bisa juga karena anak-anak dan remaja merasa diasingkan di sekolah umum. Selain itu, pendidikan yang mereka terima tidak menawarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang peserta didik pikirkan atau tidak menawarkan solusi bagi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan

sehari-hari. Bahkan karena guru tidak menginginkan peserta didik di sekolah dan ruang kelas.

Berhenti sekolah bukan hanya berhenti tetapi peserta didik juga diberhentikan karena tidak berpenampilan sesuai dengan yang diinginkan. Peserta didik berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, ada yang tidak dapat melihat, mendengar, atau berpikir dengan baik. Dengan atmosfir pendidikan yang berbeda inilah perlu adanya suatu alternatif pendidikan yang dapat mengakomodir setiap kebutuhan anak termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak merupakan tantangan yang paling berat dan sekaligus merupakan isu sangat penting dalam dunia pendidikan. Menyadari hal ini masyarakat dunia menyelenggarakan Konferensi Internasional di Jomtien Thailand tahun 1990 yang mempersoalkan pendidikan dasar bagi semua anak. Puncak dari konferensi ini adalah lahirnya deklarasi tentang "*Pendidikan untuk Semua*" (*Education for All*). Konferensi ini menyimpulkan antara lain:

1. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas atau masih banyak orang yang belum mendapat akses pendidikan.
2. Kelompok tertentu yang terpinggirkan seperti penyandang disabilitas (*disabled*), etnis minoritas, suku terasing dan sebagainya masih terdiskriminasikan dari pendidikan bersama.

Meskipun demikian, implementasi hasil dari konferensi ini belum memuaskan, khususnya yang terkait dengan para penyandang disabilitas. Para praktisi pendidikan luar biasa menyelenggarakan konferensi pendidikan luar biasa (*Special Needs Education*) di Salamanca, Spanyol tahun 1994 yang menghasilkan Pernyataan Salamanca (*Salamanca Statement*). Dalam pernyataan Salamanca inilah pendidikan inklusif (*Inclusive Education*) mulai diperkenalkan secara meluas ke berbagai negara.

Adapun isi dari pernyataan Salamanca sebagai berikut.

1. Kami, para delegasi Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus yang mewakili sembilan puluh dua pemerintah dan dua puluh lima organisasi internasional, yang berkumpul di sini Salamanca, Spanyol, dari tanggal 7-10 Juni 1994, dengan ini menegaskan kembali komitmen kami terhadap Pendidikan Untuk Semua, mengakui

perlunya dan mendesaknya memberikan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus di dalam sistem pendidikan reguler, dan selanjutnya dengan ini menyetujui Kerangka Aksi mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus, dengan semangatnya bahwa ketetapan-ketetapan serta rekomendasi-rekomendasinya diharapkan akan dijadikan pedoman oleh pemerintah-pemerintah serta organisasi-organisasi.

2. Kami meyakini dan menyatakan bahwa:

- 1) setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar;
- 2) setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda;
- 3) sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut;
- 4) mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut;
- 5) sekolah reguler dengan orientasi inklusif tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai Pendidikan bagi Semua; lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang lebih efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan.

3. Kami meminta perhatian semua pemerintah dan mendesak mereka untuk:

- 1) memberi prioritas tertinggi pada pengambilan kebijakan dan penetapan anggaran untuk meningkatkan sistem pendidikannya agar dapat menginklusi semua anak tanpa memandang perbedaan-perbedaan ataupun kesulitan-kesulitan individual mereka;
- 2) menetapkan prinsip pendidikan inklusif sebagai undang-undang atau kebijakan, sehingga semua anak ditempatkan di sekolah reguler kecuali bila terdapat alasan yang

sangat kuat untuk melakukan lain;

- 3) mengembangkan proyek percontohan dan mendorong pertukaran pengalaman dengan negara-negara yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan sekolah inklusif;
 - 4) menetapkan mekanisme partisipasi yang terdesentralisasi untuk membuat perencanaan, memantau, dan mengevaluasi kondisi pendidikan bagi anak serta orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus;
 - 5) mendorong dan memfasilitasi partisipasi orang tua, masyarakat dan organisasi para penyandang cacat dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan yang menyangkut masalah pendidikan kebutuhan khusus;
 - 6) melakukan upaya yang lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan strategi identifikasi dan penanggulangan dini, maupun dalam aspek-aspek vokasional dari pendidikan inklusif;
 - 7) demi berlangsungnya perubahan sistemik, menjamin agar program pendidikan guru, baik pendidikan pradinas maupun dalam dinas, membahas masalah pendidikan kebutuhan khusus di sekolah inklusif.
4. Kami juga meminta perhatian masyarakat internasional; secara khusus kami meminta perhatian:
- 1) Pemerintah-pemerintah yang mempunyai program kerjasama internasional dan lembaga-lembaga pendanaan internasional, terutama para sponsor Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Bank Dunia:
 - (1) agar mendukung pendekatan pendidikan inklusif serta mendukung pengembangan pendidikan kebutuhan khusus sebagai bagian yang integral dari semua program pendidikan;
 - (2) Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta lembaga-lembaga Spesialisasinya, terutama Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNESCO dan UNICEF;

- (3) agar memperkuat masukan-masukannya bagi terjalinnya kerjasama teknis, serta memperkuat kerjasama dan jaringan kerjanya agar tercipta dukungan yang lebih efisien terhadap penyelenggaraan pendidikan kebutuhan khusus yang lebih luas dan lebih terintegrasi.
- 2) Organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam perencanaan nasional dan penyaluran pelayanan:
 - (1) agar memperkuat kerjasamanya dengan badan-badannasional pemerintah dan agar mengintensifkan keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kebutuhan khusus secara inklusif;
 - 3) UNESCO, sebagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pendidikan:
 - (1) agar menjamin bahwa pendidikan kebutuhan khusus selalu merupakan bagian dari setiap diskusi mengenai Pendidikan untuk Semua dalam berbagai forum;
 - (2) agar memobilisasi dukungan dari organisasi-organisasi profesi keguruan dalam hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan guru mengenai penyelenggaraan pendidikan kebutuhan khusus;
 - (3) agar menstimulasi masyarakat akademis untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan jaringan kerja serta membentuk pusat-pusat informasi dan dokumentasi regional; juga agar berfungsi sebagai pusat penerangan bagi kegiatan-kegiatan tersebut dan agar menyebarkan hasil-hasil serta kemajuan yang telah dicapai pada tingkat negara dalam upaya mengimplementasikan deklarasi ini;
 - (4) agar memobilisasi dana melalui perluasan program penyelenggaraan sekolah-sekolah inklusif dan program dukungan masyarakat dalam rencana jangka menengah (1996-2002), yang akan memungkinkan diluncurkannya proyek perintis guna mempertunjukkan pendekatan-pendekatan baru dalam upaya penyebaran informasi, serta untuk mengembangkan indikator-indikator mengenai perlunya pendidikan kebutuhan khusus dan penyelenggaraannya.

(Ditetapkan secara aklamasi, di kota Salamanca, Spanyol pada tanggal 10 Juni 1994)

Mulai tahun 1994 inilah beberapa negara mulai melakukan inisiatif untuk mensosialisasikan gagasan pendidikan inklusif ini. Pada tahun 2000 Forum Pendidikan Dunia di Dakar Senegal menegaskan kembali bahwa setiap anak, remaja, dan semua

orang dewasa mempunyai hak (Hak Asasi) untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dari proses pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan semua kebutuhan dasar pembelajaran (*basic learning needs*) setiap individu. Forum dunia ini sepakat untuk mencapai enam tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan memperluas pendidikan anak-anak secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung.
2. Semua anak-anak pada tahun 2015 khususnya perempuan, anak-anak dengan kondisi yang memprihatinkan dan yang merupakan etnis minoritas harus bisa memperoleh dan menempuh pendidikan dasar berkualitas baik secara cuma-cuma.
3. Program yang bersifat keahlian dan tepat guna akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi anak-anak dan orang dewasa.
4. Pada tahun 2015 diharapkan akan ada peningkatan sekitar 50% untuk tingkat baca tulis orang dewasa, khususnya wanita, dan akses yang menjunjung keseimbangan akan pendidikan yang berlanjut untuk semua orang dewasa.
5. Menghilangkan isu jender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai keseimbangan jender dalam pendidikan pada tahun 2015. hal ini akan berfokus pada akses seimbang dan menyeluruh untuk wanita dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik.
6. Memperbaiki semua aspek dalam kualitas pendidikan sehingga semua hasilnya bisa dinikmati oleh semua pihak, terutama dalam baca tulis, menghitung dan keterampilan siap pakai.

Dari enam kerangka aksi tersebut, mengandung implikasi bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tujuan dan target *pendidikan untuk semua (Education For All)* dapat tercapai dan terjamin keberlangsungannya. Kata semua anak secara literal dan jelas ditunjukkan untuk semua, juga bagi anak-anak dengan keadaan yang kurang beruntung yang pada akhirnya memerlukan kebutuhan khusus. Sementara implikasi terhadap pembelajaran adalah bahwa diharapkan pembelajaran dan proses pengajaran bernuansa ramah dan menyenangkan bagi peserta didik maupun terhadap gurunya dengan motto *Well Coming School and Well Coming Teacher*.

Namun, meskipun perkembangan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan demikian pesat, tapi ternyata ini belum mampu menjangkau kepada semua kebutuhan dari peserta didik terutama mereka yang tergolong kelompok minoritas dan terabaikan. Program pendidikan bagi kelompok seperti ini biasanya dilakukan dalam *setting* yang terpisah bahkan dalam institusi yang terpisah pula. Melalui pendidikan inklusif inilah muncul harapan dan kemungkinan peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya secara lebih inklusif (tidak terpisahkan).

B. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini, penulis bertumpu kepada kajian pustaka (*library Reseach*), yakni menyajikan argumentasi dalam penalaran keilmuan yang akan menghasilkan paparan hasil dari kajian pustaka dan hasil pola pikir peneliti terhadap suatu masalah yang berisikan kejadian dalam suatu topik yang memuat beberapa ide atau gagasan yang memiliki sangkutan dengan data yang bersumber dari sumber pustaka.

Penelitian kepustakaan (*library research*) sendiri merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada umumnya berdasarkan pada kajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait (Hamzah, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan *Filosofi Pendidikan*, bukan istilah kebijakan atau legislasi dalam pendidikan, yang memungkinkan semua peserta didik memperoleh pendidikan yang terbaik. Pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan belajar semua peserta didik, dengan suatu fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marjinalisasi dan pemisahan. Dengan pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lainnya dengan dasar layanan yang kooperatif, toleransi, penerimaan, dan fleksibilitas. Pendidikan saat ini lebih mengandalkan kompetisi sesama anak dengan sebuah lingkungan yang dibatasi (*List Restrictive Environment*) akan tetapi sebuah kondisi yang berkompetisi dengan dirinya sendiri dengan lingkungan yang menumbuhkan anak untuk lebih berkembang (*More Enabling Environment*).

Dengan demikian, pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, anak-anak yang berasal dari populasi terpencil atau yang berpindah-pindah, anak-anak dari kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau dimarginalisasi (Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus).

Menurut Stainback dan Stainback (dikutip Sunardi, 2002) sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah yang inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayannya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

Menurut Sunanto (2009) pendidikan inklusif bukan semata-mata memasukkan anak luar biasa ke sekolah umum, namun justru berorientasi bagaimana layanan pendidikan ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap anak dengan keunikan dan keragaman yang secara alamiah telah mereka miliki. Pendidikan inklusif dapat diartikan bagaimana layanan pendidikan ini sangat berarti dalam pengembangan potensi dan kompetensi semua anak yang berbeda-beda sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan irama perkembangannya. Dengan setting pembelajarannya diciptakan ramah dan menyenangkan.

Menurut Staub dan Peck (1994/1995) dikutip Sunardi (2002) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas biasa.

Dengan demikian, jika dipakai pengertian tersebut di atas bahwa yang dikatakan pendidikan inklusif adalah semua anak berkebutuhan khusus harus belajar di kelas yang sama dengan teman sebayannya.

Inti pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia atas pendidikan, diumumkan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1949. Hal yang sama pentingnya adalah hak anak agar tidak didiskriminasikan, dimuat dalam Artikel 2 Konvensi Hak Anak (PBB, 1989). Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Sedangkan terdapat juga alasan penting kemanusiaan, ekonomi, sosial dan alasan politis untuk memperjuangkan suatu kebijakan dan pendekatan pendidikan inklusif, ini juga merupakan suatu alat menengahkan perkembangan pribadi dan membangun hubungan antar individu, kelompok dan bangsa. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi menegaskan bahwa:

“Sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah media yang paling efektif untuk memerangi diskriminasi, menciptakan komunitas yang ramah, membangun suatu masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua (Pernyataan Salamanca).

2. Definisi *Special Needs*

Dalam pendidikan inklusif dikenal istilah dan konsep *children with special needs* (anak dengan kebutuhan khusus) atau *children with special educational needs* (anak dengan kebutuhan pendidikan yang khusus) istilah ini tidak bermaksud menggantikan istilah “anak cacat” atau “anak luar biasa” tetapi memiliki cara pandang yang lebih luas dan positif terhadap peserta didik atau anak yang memiliki kebutuhan yang sangat beragam. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus di sini adalah setiap kebutuhan yang ada kaitannya dengan pendidikan.

Setiap anak dipandang mempunyai kebutuhan khusus baik yang permanen maupun yang temporer. Kebutuhan yang permanen adalah kebutuhan yang terus-menerus ada dan tidak akan hilang, misalnya pada anak yang memiliki kelainan penglihatan ia harus selalu membaca huruf Braille (tulisan khusus bagi tunanetra). Sedangkan kebutuhan yang bersifat temporer adalah kebutuhan yang bersifat sementara, misalnya anak yang tidak dapat berkonsentrasi karena ia sedang sedih, setelah penyebabnya hilang maka ia dapat berkonsentrasi lagi.

Ditinjau dari penyebab munculnya kebutuhan khusus tersebut dapat berasal dari diri sendiri maupun dari luar diri (lingkungan). Salah satu contoh penyebab munculnya

kebutuhan khusus dari diri sendiri adalah kecacatan (*disability*). Sedangkan kebutuhan khusus yang berasal dari lingkungan misalnya anak mengalami kesulitan belajar karena tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dan penyebabnya mungkin suasana tempat belajar yang tidak nyaman.

Di samping itu, kebutuhan khusus juga dapat dibedakan menjadi:

- a. kebutuhan khusus umum
- b. kebutuhan khusus individu
- c. kebutuhan khusus kecacatan

Kebutuhan khusus umum adalah kebutuhan khusus yang secara umum dapat terjadi pada siapapun misalnya karena sakit tidak bisa belajar dengan baik. Sedangkan kebutuhan khusus individu adalah kebutuhan yang sangat khas yang dimiliki oleh seorang anak, misalnya seseorang tidak bisa belajar sambil mendengarkan musik. Kebutuhan khusus kecacatan adalah kebutuhan khusus yang ada akibat kecacatan, misalnya kebutuhan berbicara dengan bahasa isyarat dan artikulasi bagi anak tunarungu, kebutuhan pengajaran menolong diri sendiri pada anak tunagrahita.

3. Alasan Perlunya Pendidikan Inklusif

Menurut pusat studi pendidikan inklusif di Inggris (Sunanto, 2009) ada sepuluh alasan yang mendasari pendidikan inklusif, yaitu:

- a. semua anak mempunyai hak untuk belajar bersama;
- b. anak-anak tidak perlu diperlakukan diskriminatif dengan dipisahkan dari kelompok lain karena kecacatannya;
- c. para penyandang cacat yang telah lulus dari pendidikan segregasi menuntut segera diakhirinya sistem segregasi;
- d. tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan pendidikan bagi anak cacat, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing;
- e. banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi akademik dan sosial anak cacat yang sekolah di sekolah integrasi lebih baik dari pada di sekolah umum;
- f. tidak ada pengajaran di sekolah segregasi yang tidak dapat dilaksanakan di sekolah umum;
- g. dengan komitmen dan dukungan yang baik pendidikan inklusif lebih efisien dalam

penggunaan sumber belajar;

- h. sistem segregasi dapat membuat anak menjadi banyak prasangka dan rasa cemas (tidak nyaman);
- i. semua anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka berkembang untuk hidup dalam masyarakat yang normal;
- j. hanya sistem inklusiflah yang berpotensi untuk mengurangi rasa kekhawatiran, membangun rasa persahabatan, saling menghargai dan memahami.

Di dalam pernyataan Salamanca disebutkan bahwa, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dimana ia berada tanpa memperhatikan berbagai kesulitan dan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Pada bagian lain dinyatakan pula bahwa sekolah dengan orientasi inklusif adalah sebuah langkah yang efektif untuk menghilangkan terjadinya sikap-sikap yang diskriminatif, menciptakan masyarakat terbuka, membangun masyarakat yang inklusif dan mampu mencapai pendidikan untuk semua, bahkan akan mampu memberikan pendidikan bagi mayoritas anak serta mampu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektifitas pemanfaatan dana di dalam sebuah sistem pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan inklusif akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan akomodatif kepada semua orang.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pendidikan inklusif, antara lain:

- a. Bagi peserta didik
 - 1. Sejak dini peserta didik memiliki pemahaman yang baik terhadap adanya perbedaan dan keberagaman.
 - 2. Munculnya sikap empati pada peserta didik terdorong secara alamiah.
 - 3. Munculnya budaya saling menghargai dan menghormati pada peserta didik.
 - 4. Menurunkan terjadinya stigma dan *labeling* kepada semua anak dan khususnya pada anak tertentu.
 - 5. Timbulnya budaya kooperatif dan kolaboratif pada peserta didik sehingga

memungkinkan adanya saling bantu satu sama lain.

b. Bagi Guru

1. Lebih tertantang untuk mengembangkan berbagai metode dalam mensiasati pembelajaran.
2. Bertambahnya kemampuan dan pengetahuan guru tentang keberagaman peserta didik termasuk keunikan, karakteristik, dan sekaligus kebutuhannya.
3. Terjalannya komunikasi dan kolaborasi kemitraan antar guru (Guru reguler dan Guru khusus) dan dengan ahli lainnya.
4. Bertambahnya pemahaman tentang peserta didik.
5. Berkurangnya stigma dan *labeling* terhadap anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh guru.
6. Menumbuhkan sikap empati terhadap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.

c. Bagi Otoritas Pendidikan

1. Memberikan kontribusi yang sangat besar bagi program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
2. Memberikan peluang terjadinya pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat.
3. Menggunakan biaya yang relatif lebih efisien.
4. Mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

4. Perbedaan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Integrasi

Pendidikan luar biasa (*special education*) berkecimpung dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena adanya kecacatan. Dengan kata lain anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan kecacatan menjadi fokus perhatian pendidikan luar biasa. Berkaitan dengan konsep pendidikan inklusif pendidikan luar biasa sangat berkepentingan karena penyandang cacat adalah salah satu subyek pendidikan

inklusif. Meskipun demikian pendidikan inklusif bukanlah semata-mata urusan pendidikan luar biasa tetapi urusan pendidikan secara umum.

Konsep pendidikan integrasi terfokus pada persoalan menyatukan atau menggabungkan antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan reguler. Konsep integrasi berdekatan dengan konsep mainstreaming yang terfokus pada program pengajaran khusus (tersendiri) bagi penyandang cacat dalam rangka mempersiapkan anak memasuki pendidikan reguler. Dengan kata lain pendidikan integrasi berorientasi mengubah anak untuk menyesuaikan sistem yang ada. Berbeda dengan pendidikan inklusif yang berorientasi pada perubahan sistem untuk mengakomodasi anak dalam segala keadaan.

Selain perbedaan tersebut di atas dapat dikemukakan perbedaan-perbedaan lain sebagai berikut.

Pendidikan Integrasi

1. Anak luar biasa dianggap sebagai tamu di kelas reguler.
2. Anak luar biasa dapat diterima bergabung apabila dianggap mampu menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada.
3. Anak luar biasa lebih sering belajar di kelas khusus dan terpisah dengan temannya yang lain hampir sepanjang hari.
4. Seringkali mengabaikan Aksesibilitas.
5. Kadang-kadang assessmen tidak dilakukan.

Pendidikan Inklusif

1. Anak berkebutuhan khusus secara alami merupakan anggota dari kelas tersebut.
2. Tanpa persyaratan (kurikulum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu).
3. Anak belajar bersama dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dan ramah.
4. Aksesibilitas menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan.
5. Assessmen dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan.

5. Pembelajaran yang Ramah bagi Semua Anak

Proses pembelajaran yang ramah itu esensinya pada seorang guru yang memahami setiap peserta didiknya sebagai individu yang memiliki keunikan, kemampuan, minat, kebutuhan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Pemahaman tersebut sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi semua anak.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pendidikan inklusif akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan akomodatif kepada semua orang. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tujuan dan target *pendidikan untuk semua (Education For All)* dapat tercapai dan terjamin keberlangsungannya. Kata semua anak secara literal dan jelas ditunjukkan untuk semua, juga bagi anak-anak dengan keadaan yang kurang beruntung yang pada akhirnya memerlukan kebutuhan khusus. Sementara implikasi terhadap pembelajaran adalah bahwa diharapkan pembelajaran dan proses pengajaran bernuansa ramah dan menyenangkan bagi peserta didik maupun terhadap gurunya dengan motto *Well Coming School and Well Coming Teacher*. Pendidikan yang ramah merupakan pendidikan yang memahami setiap peserta didiknya sebagai individu yang memiliki keunikan, kemampuan, minat, kebutuhan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Pemahaman tersebut sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi semua anak.

E. Referensi

- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945 – 2007*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat PLB. (2004). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Menenal Pendidikan Terpadu)*. Jakarta: Depdiknas
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikasi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI – No.70 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 41

- Sheldon, S. (2000). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Diakses pada tanggal 20 September 2022 dari http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF.
- Sunanto, D. (2009). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Bandung: Pusat Kajian dan Inovasi Pendidikan – Sekolah Pasca Sarjana UPI
- Sunardi, (2002), Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa, Dikti, Depdikbud, Jakarta
- Unesco. (2011). The Right of Children with Disabilities to Education: A rights-based Approach to Inclusive Education. Diakses pada tanggal 15 September 2022 dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf>.
- Unesco. (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Diakses pada tanggal 18 September 2022 dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf>.
- Unesco. (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Diakses pada tanggal 15 September 2022 dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf>.
- Unicef. (2011). The Right of Children with Disabilities to Education: A rights based Approach to Inclusive Education". Diakses pada tanggal 20 September 2022 dari http://www.unicef.org/ceecis/IEPositionPaper_ENGLISH.pdf.
- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.